

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI SULAWESI BARAT**

**YOLANDA ANGELITA DESYA**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI SULAWESI BARAT**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

**YOLANDA ANGELITA DESYA  
A011191123**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI SULAWESI BARAT

disusun dan diajukan oleh :

**YOLANDA ANGELITA DESYA**  
**A011191123**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 11 April 2023

Pembimbing I



Dr. Madris, DPS., M.Si., CWM®  
NIP. 19601231 198811 1 001

Pembimbing II



Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D  
NIP. 19610806 198903 1 004

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Salvi, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003

# SKRIPSI

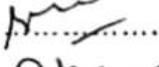
## ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI SULAWESI BARAT

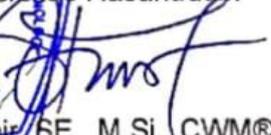
disusun dan diajukan oleh :

**YOLANDA ANGELITA DESYA**  
**A011191123**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 11 April 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Madris, DPS., M.Si., CWM®	Ketua	1... 
2.	Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D	Sekretaris	2... 
3.	Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM®	Anggota	3... 
4.	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®	Anggota	4... 

  
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
  
Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : YOLANDA ANGELITA DESYA  
Nomor Pokok : A011191123  
Program Studi : Ilmu Ekonomi  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Barat*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 11 April 2023

Yang Menyatakan



**Yolanda Angelita Desya**

**A011191123**

## PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang empunya kehidupan ini atas kekuatan, kesehatan serta hikmat dan akal budi yang telah di anugerahkan kepada penulis untuk merampungkan skripsi yang berjudul *“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Barat”*. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai, begitu banyak kisah kasih, suka dan duka serta hambatan-hambatan yang penulis alami tetapi semuanya dapat terlewati karena adanya dukungan doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mama tercinta Debora S.Pi dan Bapak tercinta Sarfin S.Pi yang tanpa henti memberikan kasih sayang, motivasi, nasihat, bantuan materi, moril dan segala sesuatunya yang terbaik untuk penulis, serta atas doa yang tiada hentinya dan pengorbanan yang begitu besar sehingga penulis dapat menjadi seperti sekarang ini. Adik tercinta Aurel yang turut memberikan bantuan dan motivasi bagi penulis. Serta terima kasih pula buat keluarga besar tante Epi, tante Hana, om Sarif, nenek Paulina,

tante Suri, dan nenek Raufa atas bantuan dalam bentuk materi dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

2. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., beserta jajarannya.
4. Ketua Departemen Jurusan Ilmu Ekonomi, Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi, Ibu Dr. Fitriwati, SE., M.Si.
5. Dr. Madris, DPS., M.Si., CWM® selaku dosen pembimbing I. Terima kasih telah meluangkan waktunya dalam memberi arahan, nasehat dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini, semoga Tuhan memberkati, panjang umur dan sehat selalu.
6. Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA., Ph.D selaku penasehat akademik dan dosen pembimbing II. Terima kasih untuk segala pengertian, nasehat, arahan, serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan panjang umur serta sehat selalu.
7. Ibu Dr. Fatmawati, SE., M.Si., CWM® dan Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM® selaku dosen penguji. Terima kasih telah meluangkan waktunya, saran dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini, semoga Tuhan membalas kebaikan ibu dan bapak serta diberi umur panjang dan kesehatan.

8. Staff Departemen Ilmu Ekonomi, Pak Oscar dan Ibu Dama, terima kasih karena telah membantu saya selama saya mengurus berkas-berkas di departemen.
9. Staff dan Pegawai Akademik, terima kasih banyak untuk bantuannya dalam proses pengurusan berkas mulai dari semester awal hingga semester akhir.
10. Teman-teman PMKO Prio yang selalu ada yaitu Angel, Yusli, Tasha, Cia dan Resly terima kasih telah menjadi teman dikala susah dan senang selama masa perkuliahan, mewarnai setiap momen kehidupan perkuliahan.
11. Teman-teman Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (PMKO FEB-UH), terkhususnya Yunita, Lydia, Adel, Jeni, Eve, Pina, Ines, Chiko, Chassya, Desi, Andre, Betran, Chanyu, Harol, Juna, Iman dan nama lain yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas pengalaman dan kebersamaannya yang turut mewarnai lika-liku kehidupan penulis selama di kampus.
12. Teman-teman Formiga Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi (HIMAJIE FEB-UH) dan Griffins 19 terkhususnya Mukrimah, Joy, Atun, Eri, Mega, Inayah, Febby, Farah, Windy, Mario, Ardi, Muhajir, Anto, Arhab, Adiva, Alif, Falih, Kurca, Geby, Ainun, Alwi, Risma, Pupet, Mita, Nure, Nia, Tina, Mumin, Sani, Indah, Aenul, Chairul, Haerul, dan nama

lain yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semua pengalaman dan kenangan yang ada selama masa perkuliahan.

13. Pemilik NIM A011191172 terima kasih telah membantu dan menemani dalam proses penyelesaian skripsi ini, tetap semangat dalam menggapai cita-cita di masa depan.

14. Teman-teman KKN PPM Pangkep Gel. 108 Posko Bulu Cindea, terima kasih telah bekerja sama dan mewarnai hari-hari selama masa KKN dengan penuh canda tawa, belajar bersama, hingga mengukir banyak kenangan indah. Khususnya Arizky dan Fia terima kasih telah menjadi teman yang suportif dalam segala hal, saya bersyukur bisa menjadi bagian dari posko ini.

15. Teman-teman Gerakan Mahasiswa Kristen Oikumene Komisariat Ekonomi Universitas Hasanuddin, terkhususnya kak Yosua Kalessa, kak Valdi, Kak Gabriel, dan Kak Eky. Terima kasih karena telah mewarnai perjalanan penulis dengan penuh canda tawa dan kenangan yang diberikan.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kualitas sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik tahun 2010-2021. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Sedangkan, pengeluaran pemerintah secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kualitas sumber daya manusia melalui PDRB per kapita. Investasi secara langsung berpengaruh negatif terhadap kualitas sumber daya manusia. Sedangkan, investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia melalui PDRB per kapita.

Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah, Investasi, PDRB Per Kapita, Kualitas Sumber Daya Manusia

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of government spending and investment on the quality of human resources, both directly and indirectly through per capita GRDP in West Sulawesi. This research is quantitative using secondary data from the Central Bureau of Statistics for 2010-2021. The analysis model used is multiple linear regression analysis with the help of the Eviews 10 program. The results of this study indicate that government spending has a direct positive effect on the quality of human resources. Meanwhile, government spending indirectly has a negative effect on the quality of human resources through GRDP per capita. Investment directly negatively affects the quality of human resources. Meanwhile, investment indirectly has a positive effect on the quality of human resources through per capita GRDP.*

*Keywords: Government Expenditure, Investment, Gross Regional Domestic Product (GRDP) Per Capita, Human Resource Quality.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teoritis .....	9
2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia.....	9
2.1.2 Teori Modal Manusia ( <i>Human Capital</i> ) .....	11
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB Per Kapita) ..	13
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah .....	15
2.1.5 Teori Pengeluaran Pemerintah .....	16
2.1.6 Investasi .....	17
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	18
2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PDRB Per Kapita dan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	18
2.2.2 Hubungan Investasi dengan PDRB Per Kapita dan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	19
2.3 Hasil Penelitian dan Studi Empiris .....	21
2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	24
2.5 Hipotesis Penelitian .....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	26
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	27
3.4 Metode Analisis Data.....	27
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
4.1 Gambaran Umum Kualitas Sumber Daya Manusia.....	30
4.2 Pengeluaran Pemerintah .....	32

4.3	Investasi .....	33
4.4	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB Per Kapita) .....	34
4.5	Hasil Estimasi .....	38
4.6	Pembahasan Hasil Estimasi .....	38
4.6.1	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB Per Kapita .....	41
4.6.2	Pengaruh Investasi terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB Per Kapita .....	40
4.6.3	Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia .....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		45
5.1	Kesimpulan.....	44
5.2	Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA.....		46

## DAFTAR TABEL

### Tabel

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi dan Indonesia Tahun 2020-2021 (persen) .....	3
Tabel 1.2 Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2021 .....	5
Tabel 4.3 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah (X1) dan Investasi (X2) terhadap PDRB Per Kapita (Y1).....	36
Tabel 4.4 Hasil Estimasi Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah (X1), Investasi (X2), PDRB Per Kapita (Y1) terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (Y2) .....	37
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Pengaruh Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah (X1) dan Investasi (X2) terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (Y2) Melalui PDRB Per Kapita (Y1) .....	38

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	24
Gambar 3.2 Model Struktural Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia.....	28
Gambar 4.3 Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Sulbar 2020-2021 (persen) .....	31
Gambar 4.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Sulbar 2021 .....	32

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset fundamental bagi pembangunan suatu negara. Pembangunan manusia mempunyai tujuan utama yang berfokus pada pembangunan manusia seutuhnya dan seluruhnya, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Untuk memaksimalkan pembangunan, Indonesia membutuhkan masyarakat yang unggul dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDMnya. Adapun kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari komponen pembangunan manusia yang dianggap menjadi dasar yaitu dimensi tersebut adalah: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup layak (*decent standard of living*). (BPS, 2022).

*United Nation Development Programme* (UNDP) yaitu lembaga dunia yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperkenalkan IPM kali pertama pada tahun 1990. Sampai dengan tahun 2016, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM. Revisi yang cukup besar dilakukan pada tahun 2010. UNDP menyebut revisi itu dengan era baru pembangunan manusia. UNDP memperkenalkan dua indikator baru yang sekaligus menggantikan dua indikator metode lama. Angka melek huruf pada metode lama diganti

dengan Angka Harapan Lama Sekolah; Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Metode penghitungan dan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Indikator pertama pembentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH) saat lahir. AHH saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir. Indikator kedua adalah pengetahuan yang diukur dengan pendidikan, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu. Selanjutnya, dimensi ketiga adalah standar hidup layak yang diukur dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP). Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

*United Nations Development Program* (UNDP) juga memperkenalkan suatu indikator yang telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. (Adrogué & Crespo, 2010). Kemajuan IPM menggambarkan intensitas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode. Status IPM menggambarkan level pencapaian

pembangunan manusia dalam suatu periode: sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ), tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ), sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ), rendah ( $IPM < 60$ ). BPS, (2022).

Tabel 1.1

Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi dan Indonesia Tahun 2020-2021 (persen)

Tahun	Sulawesi Barat	Sulawesi Selatan	Sulawesi	Indonesia
2010	59.74	66.00	64.25	66.53
2011	60.63	66.65	64.98	67.09
2012	61.01	67.26	65.59	67.70
2013	61.53	67.92	66.16	68.31
2014	62.24	68.49	66.73	68.90
2015	62.96	69.15	67.31	69.55
2016	63.60	69.76	67.91	70.18
2017	64.30	70.34	68.55	70.81
2018	65.10	70.90	69.23	71.39
2019	65.73	71.66	69.93	71.92
2020	66.11	71.93	70.11	71.94
2021	66.36	72.24	70.39	72.29

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, 2022

Tabel 1.1 di atas menjelaskan dalam dua belas tahun terakhir perbandingan perkembangan IPM Sulawesi Barat dengan IPM Provinsi Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi, dan Indonesia yang tiap tahunnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kesejahteraan merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat jasa dalam membantu masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dengan persentase yang baik menunjukkan bahwa dalam daerah tersebut tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup baik. (Whitaker dan Federico, 1997). Namun, jika dibandingkan dengan dengan rata-rata nasional dalam dua belas tahun terakhir, IPM Sulawesi Barat masih tertinggal, terlihat dari data

diatas dari tahun 2010 hingga 2021 belum pernah menyentuh rata-rata baik Sulawesi Selatan, regional maupun nasional. IPM Sulawesi Barat hanya berada diposisi IPM sedang ( $60 \leq \text{IPM} \leq 70$ ). Pada tahun 2010 sebesar 59.74 persen sedangkan IPM Sulawesi Selatan 66.00 persen, IPM regional sebesar 64.25 persen dan IPM nasional sebesar 66.53 persen. Hingga pada tahun 2021 rata-rata IPM Sulawesi Barat terus meningkat namun hanya mampu mencapai 65.52 persen sedangkan rata-rata IPM Sulawesi Selatan telah mencapai 72.24 persen, IPM regional sebesar 70.39 persen dan rata-rata nasional sebesar 72.29 persen.

Faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan suatu bangsa adalah modal manusia, sumber daya alam hanyalah *raw material* yang sifatnya pasif sehingga tidak dapat menentukan kecepatan dalam pembangunan negara (Todaro dan Smith, 2015). Ini menunjukkan bahwa Sulawesi Barat memiliki pembangunan manusia yang belum mampu mendorong kecepatan pembangunan daerah.

Pertumbuhan PDRB per kapita suatu daerah dapat digunakan sebagai salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan proyeksi indikator untuk menentukan tingkat pendapatan perkapita disuatu wilayah. PDRB per kapita juga memiliki peran penting dalam peningkatan indeks pembangunan manusia, karena dari pendapatan yang di terima oleh seseorang dapat membiayai sekolah agar memiliki pendidikan yang baik yang dapat mendorong tingkat kesehatan karena mampu memenuhi kebutuhan dasar agar tidak mengalami penyakit seperti gizi buruk dan dari hal ini akan secara otomatis akan meningkatkan indeks pembangunan

manusia. Dalam 10 tahun terakhir peningkatan dari variabel pengeluaran pemerintah, investasi, dan PDRB per kapita menunjukkan tren positif, meskipun terlihat beberapa kali menunjukkan angka penurunan. Namun demikian, peningkatan variabel tersebut tidak beriringan dengan adanya peningkatan yang signifikan terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

Tabel 1.2

PDRB Per Kapita, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2021

<b>Tahun</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rupiah)</b>	<b>Investasi (Miliar Rupiah)</b>	<b>PDRB Per Kapita (Rupiah)</b>
2010	607.67	4548.89	14,792,594
2011	731.37	5223.61	16,977,203
2012	868.13	5599.7	18,576,447
2013	1043.99	6253.9	20,457,334
2014	1227.42	6726.59	23,415,055
2015	1385.84	7182.86	25,727,706
2016	2152.02	7984.37	27,513,056
2017	1927.38	8617.01	29,675,856
2018	1746.62	9082.97	32,059,093
2019	2006.03	9630.54	33,592,167
2020	1989.56	8810.67	32,713,242
2021	1986.34	9465.98	35,036,023

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat diolah, 2022

Tabel 1.2 di atas menunjukkan perkembangan pendapatan per kapita Sulawesi Barat dapat dilihat dari PDRB perkapita yang cenderung meningkat dalam dua belas tahun terakhir. Pada tahun 2010 menunjukkan sebesar 14,792,594 rupiah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 33,592,167 rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2020 menurun menjadi 32,713,242 rupiah dan kembali meningkat sebesar 35,036,023 rupiah pada tahun 2021.

Peran Investasi yang diukur menggunakan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap kepentingan pelaku bisnis dan penyusunan kebijakan pemerintah cukup penting, hal tersebut disebabkan karena meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) akan meningkatkan penambahan lapangan pekerjaan baru yang terjadi akibat tingginya kebutuhan pihak swasta pada tenaga kerja dan berimbas pada naiknya PDRB yang meningkatkan konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. (Buwono, K. S., 2022).

Tabel 1.2 menunjukkan investasi yang cukup baik terjadi peningkatan dalam dua belas tahun terakhir. Pada tahun 2010 hingga 2019 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2010 menunjukkan investasi sebesar 4.548,89 miliar rupiah. Kemudian, terus meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai 9.630,54 miliar rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 8.810,67 miliar rupiah. Namun, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 9.465,98 miliar rupiah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan luas di era otonomi saat ini wajib mampu memberdayakan alokasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal pemerintah daerah yang tepat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.2 menunjukkan pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam dua belas tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 sebesar 607,67 miliar rupiah terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 mencapai 2.152,02 miliar rupiah. Namun, pada tahun 2017 menurun

menjadi 1.927,38 miliar rupiah hingga tahun 2018 menjadi 1.746,62 miliar rupiah. Terjadi peningkatan kembali tahun 2019 sebesar 2.006,03 miliar rupiah hingga tahun 2021 hanya mencapai 1.986,34 miliar rupiah.

Dalam era otonomi saat ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengalokasikan, mendistribusikan, dan menstabilkan sumber daya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam hal ini dan harus memanfaatkan alokasi anggaran dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Namun, fenomena yang terjadi di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa tidak semua daerah dengan belanja daerah yang tinggi memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi pula.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Sulawesi Barat”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Sulawesi Barat?
2. Apakah investasi berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Sulawesi Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap kualitas sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Sulawesi Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **a. Institusi**

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pembaca baik masyarakat secara umum maupun akademisi yang ingin mengetahui terkait kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat dengan serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau pembanding untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **b. Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang pentingnya kualitas sumber daya manusia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia adalah ukuran pencapaian suatu pembangunan manusia yang berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia mempunyai tujuan yang sangat penting, yakni membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.

Variabel dalam IPM metode baru yaitu Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (*Life Expectancy - e*) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan; Rata-rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling - MYS*) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas; Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur

berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak; Pengeluaran per Kapita Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*)/(PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota.

Dalam UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging people's choices"*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dikutip dari UNDP (*Human Development Report, 1995*), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah: (1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian; (2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. (3) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya

meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. (4) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. (5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

### **2.1.2 Teori Modal Manusia (*Human Capital*)**

Pada tahun 1961, Theodore W. Schultz pertama kali memperkenalkan teori modal manusia (*human capital*). Dalam teorinya Schultz menekankan bahwa manusia adalah suatu modal layaknya bentuk modal lainnya seperti mesin dan teknologi. Selain menekankan tentang hal tersebut, Schultz juga menegaskan bahwa pendidikan, pengetahuan, kesehatan serta keterampilan merupakan bentuk dari modal manusia. Tentu investasi dalam modal sosial juga mendatangkan imbalan

(penghasilan) dimasa mendatang sama seperti investasi dalam modal fisik. (Schultz, 1961).

Teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Becker, menyatakan jika manusia bukan sekedar sumber daya tetapi dapat berbentuk modal. Modal manusia sangat penting yang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan, atau dengan adanya kebiasaan baik yang terus bertambah di kehidupan untuk menunjang produktivitasnya. Beberapa hal tersebut dapat disebut sebagai modal manusia dikarenakan manusia tidak dapat terpisahkan oleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan juga nilai-nilai lain yang berhubungan dengan keuangan dan fisik mereka. Menurut Becker, modal manusia mengacu pada cadangan keterampilan dan pengetahuan produksi manusia melalui kesehatan dan pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan dan kesehatan seseorang, menggambarkan semakin tingginya modal manusia yang diharapkan. Maka dari itu, Investasi pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kualitas SDM, hal ini guna semua lapisan masyarakat mendapatkan hak yang sama, karena pada implementasinya, masyarakat miskin tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan karna pendapatan yang mereka peroleh difokuskan untuk kebutuhan pangan (Becker, 1993).

Menurut Todaro (2000), melalui bidang pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan investasi modal manusia. Kedua bidang ini memainkan peranan yang amat penting, pendidikan dapat menentukan kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi yang modern dan menciptakan pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu kesehatan

merupakan hal penting dalam peningkatan produktivitas. Dapat disimpulkan pendidikan dan kesehatan merupakan unsur penting dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input dari fungsi produksi agregat. Pengembangan modal manusia memiliki beberapa faktor penting, diantaranya pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tersebut bisa menjadi suatu nilai tambah seorang pekerja untuk meningkatkan produktivitasnya. Secara sederhana semakin tinggi pendidikannya semakin tinggi juga kemungkinan penghasilan yang didapatkan. Investasi modal manusia dalam bidang pendidikan merupakan faktor penting, karena pendidikan dapat menciptakan modal manusia yang berkualitas dan dapat memberikan *multiplier effect* dan berkontribusi dalam pembangunan perekonomian suatu negara.

Disamping pendidikan dan latihan, kesehatan juga merupakan faktor penunjang pengembangan modal manusia. Kesehatan merupakan dasar dari produktivitas dan kapasitas dalam meningkatkan pendidikan. Tenaga kerja yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik akan lebih produktif dibanding yang tingkat kesehatannya rendah, semakin tinggi produktivitas yang dimiliki juga akan mendapatkan penghasilan yang semakin tinggi. Dapat disimpulkan kesehatan merupakan input penting bagi modal manusia dalam meningkatkan produktivitas.

### **2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB Per Kapita)**

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi pendapatan nasional suatu negara pada tahun tertentu dengan

jumlah penduduk negara tersebut pada tahun tersebut. Untuk mengukur kondisi individu atau rumah tangga, salah satu item yang sering digunakan adalah tingkat pendapatan. Pendapatan adalah semua uang yang diterima seseorang atau rumah tangga dalam kegiatan ekonomi selama periode waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan aktual dalam produksi barang dan jasa suatu negara pada tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berlaku tidak serta merta mengarah pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kekayaan (pendapatan) orang, bahkan jika itu berlangsung untuk jangka waktu tertentu yaitu karena simultanitas pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat populasi, pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan per kapita) akan turun. Jika pertumbuhan ekonomi jangka panjang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, maka perekonomian negara tidak akan berkembang dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak akan meningkat.

Untuk mendapatkan jumlah pendapatan rata-rata penduduk, pendapatan nasional dihitung dari jumlah seluruh pendapatan penduduk negara tersebut. Oleh sebab itu, jumlah penduduk praktis akan mempengaruhi jumlah pendapatan perkapita suatu negara. Pendapatan perkapita dapat juga diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Cara menghitung pendapatan perkapita adalah menjumlahkan pendapatan seluruh penduduk suatu negara pada

tahun tertentu. Kemudian, dibagi dengan jumlah penduduk negara yang bersangkutan pada periode tahun yang sama.

Kemampuan pendapatan perkapita dalam mengukur tingkat kesejahteraan negara dan sebagai indikator kehidupan negara dapat dijadikan sebagai salah satu analisis ekonomi bagi pemerintah maupun organisasi ekonomi untuk mengambil kebijakan ekonomi. Secara ringkas kita dapat menyimpulkan beberapa manfaat dari perhitungan pendapatan perkapita yaitu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dari waktu ke waktu, membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara satu dengan yang lainnya, sebagai pedoman bagi pemerintah dan membuat kebijakan ekonomi, mengelompokkan sebagai negara ke beberapa tingkat pendapatan.

#### **2.1.4 Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah. (Sukirno, 2005). Tujuan dari kebijakan fiskal ini yaitu untuk menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan pemerintah daerah yang mendeskripsikan mengenai perkiraan pengeluaran yang sebesar-besarnya dalam belanja kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun, serta juga dapat menggambarkan mengenai estimasi pendapatan dan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk menutupi biaya yang dimaksud. (Ramadani, 2017). APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. (Dharmawati & Irmadaroyani, 2016). Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut (Mahsun dkk, 2011). Belanja daerah teralokasi secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Zebua, 2014).

#### **2.1.5 Teori Pengeluaran Pemerintah**

Musgrave (1993) mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi yang bersifat kolektif publik dan/atau kegiatan nirlaba tidak dapat dilakukan oleh pasar. Kegagalan pasar, berlawanan dengan tiga peran pemerintah, yaitu peran distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana pada sektor kesehatan dan pendidikan yang belum menyentuh pasar. Investasi publik pada sektor kesehatan dan pendidikan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan serta pendidikan, sehingga mampu melakukan peningkatan pada SDM yang andal dan sehat. Peningkatan

kesehatan serta pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **2.1.6 Investasi**

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk merealisasikan sasaran-sasaran dari program pembangunan. Anggaran pembangunan dialokasikan terutama untuk membiayai proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat. Pengeluaran pembangunan lah yang memiliki sumbangan terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto nasional yang dilakukan pemerintah pusat.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah (BPS, 2022). PMTB merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, PMTB menunjukkan seberapa besar investasi yang dilakukan suatu daerah dari tahun ke tahun. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan suatu produksi. Tanpa adanya investasi, proses produksi tidak akan berjalan lancar yang mengakibatkan penurunan pada output keseluruhan. Kenaikan investasi akan menambah kapasitas produksi dan

meningkatkan output baik daerah maupun nasional, sehingga meningkatkan pendapatan per kapita (Yuhendri, 2013). Cara mengetahui informasi tentang PMTB, tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan suatu wilayah. Sebagian dari investasi itulah yang akan dibelanjakan untuk membeli barang modal dan persediaan yang akan digunakan dalam kegiatan produksi.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan PDRB Per Kapita dan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Pada umumnya, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan akses ke pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja. Sementara itu, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi angka kematian bayi dan ibu, serta meningkatkan harapan hidup. Pendapatan per kapita dapat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor ekonomi lainnya. Semakin besar pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor ini, semakin besar juga peluang untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia.

Musgrave (1993) mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi yang bersifat kolektif publik dan/atau kegiatan nirlaba tidak dapat dilakukan oleh

pasar. Kegagalan pasar, berlawanan dengan tiga peran pemerintah, yaitu peran distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana pada sektor kesehatan dan pendidikan yang belum menyentuh pasar. Investasi publik pada sektor kesehatan dan pendidikan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan serta pendidikan, sehingga mampu melakukan peningkatan pada SDM yang andal dan sehat. Peningkatan kesehatan serta pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain, pengeluaran pemerintah pada infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semakin besar pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia.

### **2.2.2 Hubungan Investasi dengan PDRB Per Kapita dan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Investasi atau PMTB yang tepat sasaran dan efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi suatu daerah, sehingga dapat meningkatkan PDRB per kapita. Pembentukan modal tetap yang baik dapat meningkatkan kemampuan produksi suatu daerah, sehingga meningkatkan pendapatan per kapita. Dalam hal ini, PMTB menjadi faktor penting dalam meningkatkan PDRB per kapita, karena PMTB membantu memperbaiki infrastruktur dan menambah

fasilitas produksi sehingga mempermudah proses produksi, meningkatkan kualitas produk dan menurunkan biaya produksi. Ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

PMTB yang tepat sasaran dan efektif dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan ini, maka kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan dan IPM dapat meningkat.

Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya atau masa yang akan datang perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang lebih besar (Sukirno, 2006).

Saat pembentukan modal tetap domestik bruto meningkat, maka akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga menghasilkan lebih banyak produk sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan pendapatan pajak sehingga pengeluaran konsumsi pemerintah pun akan semakin meningkat. Salah satu bentuk pengeluaran konsumsi pemerintah adalah pengeluaran untuk subsidi, dengan meningkatkan subsidi dari pemerintah, masyarakat

miskin dapat memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan pokok dan kebutuhan pendidikan dan kesehatan sehingga standar hidup, pendidikan dan kesehatan mereka meningkat. Meningkatnya standar hidup, pendidikan dan kesehatan pada akhirnya akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. (Yanti, E. F., Indrawati, L. R., & Prasetyanto, P. K., 2018).

### **2.3 Studi Empiris**

Furi Larassita, Y., (2016) meneliti terkait Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Periode 1990 - 2014 (*The Effect of Local Budget (APBD) Through Human Development Index in Jember District in The Period of 1990 - 2014*). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel realisasi anggaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember. Hal ini menjelaskan bahwa realisasi anggaran pemerintah cenderung meningkat setiap tahunnya bertujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jember.

Sasti, P., & Latrini, M., (2019)., meneliti terkait Pengaruh Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh alokasi belanja operasi dan belanja modal pada indeks pembangunan manusia. Penelitian ini dilakukan di 9 Kabupaten/Kota

Provinsi Bali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Indeks Pembangunan Manusia seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2013-2017. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, dengan jumlah sampel sebanyak 45 amatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja operasi berpengaruh pada indeks pembangunan manusia dan belanja modal tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia.

Yanti, E. F., Indrawati, L. R., & Prasetyanto, P. K. (2018)., meneliti terkait Analisis Pengaruh PMTB, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan Kemiskinan terhadap IPM di Indonesia Periode 2010-2018. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan modal tetap domestik bruto tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, pengeluaran konsumsi pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan dan bermakna terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, dan pembentukan modal tetap domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Sasana, H. (2016) meneliti terkait Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan program perangkat

lunak Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pertama memiliki efek positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kedua, pendapatan perkapita belum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota tingkat Provinsi Jawa Tengah.

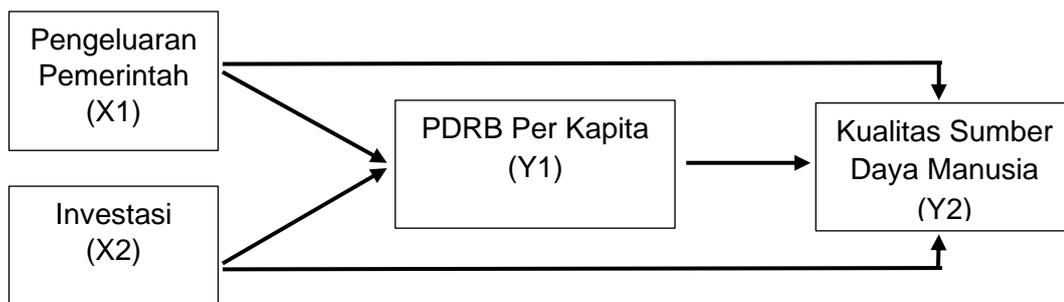
Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022) meneliti terkait Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. IPM di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendapatan perkapita, dan kemiskinan. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 15 kab/kota di Provinsi Lampung periode 2015-2019, sehingga model regresi data panel adalah metode yang digunakan pada penelitian ini, dengan model yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model (FEM)*. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung, pendapatan perkapita berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung, kemiskinan tidak berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Lampung.

Amrullah, R. (2022) meneliti terkait Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Anggaran Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Kabupaten Di Pulau Madura. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan variabel yang digunakan dalam studi ini adalah IPM, PDRB per kapita, Anggaran Sektor Kesehatan, dan Anggaran Sektor Pendidikan di Pulau Madura. Data yang digunakan dalam

studi ini diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh positif, Anggaran Sektor Kesehatan memiliki pengaruh negatif, dan Anggaran Sektor Pendidikan memiliki pengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia di semua kabupaten di Pulau Madura.

## 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 2.1  
Kerangka Pikir Penelitian



## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu kemungkinan atau dugaan sementara untuk menjawab masalah yang diajukan dan masih belum teruji kebenarannya berdasarkan fakta yang ada. Berpedoman pada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Sulawesi Barat.

2. Diduga terdapat pengaruh investasi terhadap kualitas sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung melalui PDRB per kapita di Sulawesi Barat.